

**PENGARUH PERENCANAAN, PELAKSANAAN, LAPORAN KEUANGAN,  
EVALUASI DAN TUNJANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA  
DENGAN SISTEM INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
PADA SEKRETARIAT BPSDM PERHUBUNGAN**

<sup>1</sup>Pandu Winara, <sup>2</sup>Rossje Surya Putri

Universitas Trisakti

[pandu\\_ws@yahoo.co.id](mailto:pandu_ws@yahoo.co.id)

**ABSTRAC**

This study aims to determine the effect of planning, implementation, financial statement, evaluation and benefits on performance accountability with information systems as moderating variables at the BPSDM Transportation Secretariat. In accordance with the Instruction of the President of the Republic of Indonesia (Inpres) Number 7 of 1999 concerning Performance Accountability of Government Agencies, it requires every government agency as an organizing element of the state government to account for the implementation of basic tasks and functions as well as the authority to manage resources based on a strategic plan determined by each agency . The government referred to in the form of reports submitted to their respective superiors, supervisory institutions and accountability assessors and finally submitted to the president as head of government. The population in this study were employees of the BPSDM Transportation Secretariat. The number of samples used in this study is assumed to be 100 respondents.

The results of the analysis show planning, implementation, financial statement, evaluation, benefits affect the accountability of performance and information systems as moderating variables can strengthen the relationship planning, implementation, financial reporting, evaluation, benefits with performance accountability.

**Keywords: Planning, Implementation, Financial Reporting, Evaluation, Benefits, Performance Accountability, Information Systems**

**PENDAHULUAN**

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi, untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi dikritik dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sekarang ini, dalam penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali tercermin dari kinerja organisasi sektor publik yang tergambar tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas dan miskin kreativitas.

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian,

2010:171). Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep pengukuran kinerja (*value for money*) dan pengawasan atas kinerja output. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20).

Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan. Ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta

pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pemerintah dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Keberadaan Sekretariat BPSDM Perhubungan sebagai motor penggerak bagi unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan sebagai unit kerja yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang melaksanakan tugas pembinaan secara teknis administratif, yaitu : (1) melakukan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja anggaran, perumusan kinerja, pengelolaan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta pelaporan; (2) melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengelolaan organisasi dan tata laksana; (3) menyiapkan anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi keuangan dan Barang Milik Negara serta pengelolaan tindak lanjut hasil temuan; (4) menyiapkan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, keprotokolan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum dan penyusunan pertimbangan hukum, kerja sama, pengelolaan teknologi dan informasi, pelaksanaan kehumasan, penyuluhan dan

sosialisasi, serta pelayanan informasi publik.

Teknologi informasi suatu organisasi digunakan untuk meningkatkan kinerja para individual sebagai anggota organisasi yang diharapkan dapat ditingkatkan. Pentingnya pemakaian sistem informasi sebagai mata rantai kinerja dan hasilnya secara luas dikenali pada tingkat analisis kelompok maupun organisasi. Oleh karena itu, organisasi yang menerapkan teknologi informasi perlu memperhatikan sejauh mana keberhasilan sistem tersebut membawa dampak positif dalam peningkatan kinerja baik individu maupun organisasi secara keseluruhan.

Penelitian ini mengembangkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain oleh Herawati, Netty (2011) dan Aprila dan Melfariza (2014). Perbedaannya adalah pada penelitian ini menambahkan variabel yang pada penelitian sebelumnya belum ada yaitu variabel Evaluasi kinerja dan Tunjangan Kinerja dan menambahkan Sistem Informasi sebagai variabel moderating. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan lima variabel independen, variabel dependen dan variabel moderasi yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, evaluasi kinerja dan tunjangan kinerja terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja keuangan dan di moderasi oleh sistem informasi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya juga terdapat pada objek penelitian adalah tingkat Kementerian yaitu Sekretariat BPSDM Perhubungan sedangkan penelitian sebelumnya objek di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perencanaan, pelaksanaan, laporan keuangan, evaluasi, tunjangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dan sistem informasi sebagai variabel moderasi si pada Sekretariat BPSDM Perhubungan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Stewardship**

Menurut Donaldson et all (1991) dimana teori ini menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Pada pelaksanaan anggaran ini kepentingan organisasi/pemerintah dalam hal ini sangat diutamakan dan kepentingan individu dikesampingkan. Dengan keberhasilan pencapaian anggaran ini mencerminkan kinerja pemerintah yang baik dan membuktikan bahwa pemerintah dapat mengelola dana rakyat dengan penyerapan anggaran untuk kepentingan rakyat.

### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Hubungan keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak Principal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama Principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Hubungan keagenan juga terjadi antara Masyarakat dan Legislatif. Von Hagen (2002) berpendapat bahwa hubungan keagenan antara voters-legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat kebijakan publik bagi mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak.

Dengan demikian, legislatif menjadi agen bagi masyarakat untuk mewakili kepentingan mereka di Parlemen. Masyarakat sebagai *The Ultimate Principal* mengharapkan Legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang dapat membawa kemakmuran bagi mereka.

### **Akuntabilitas Kinerja Keuangan**

Akuntabilitas diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Pengertian

*accountability dan responsibility* seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, *responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Menurut Indra Bastian (2010:385) mengemukakan Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*).

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **1. Perencanaan terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan system perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Penelitian terdahulu oleh Haslinda (2016) menguji Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Organisasi dengan Standar Biaya Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo). Hasil menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi, evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditentukan hipotesa :

H1 : Perencanaan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja

## 2. Pelaksanaan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat, bahkan dengan prakiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan kebijakan yang mendasar untuk menghindari terganggunya aktivitas satker dan manajemen program/kegiatan.

Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para pengambil keputusan.

Penelitian terdahulu oleh Aprila dan Melfariza (2014) pada risetnya yaitu Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Hasilnya adalah Terdapat pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran, evaluasi kinerja yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditentukan hipotesa :

H2 : Pelaksanaan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja

## 3. Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pada dasarnya, laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi sebagai alat komunikasi, biasanya laporan keuangan sering disebut sebagai produk akhir dari proses akuntansi. Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan barang. Laporan barang sebagai bahan pendukung penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.

Penelitian terdahulu oleh Herawati, Netty (2011) menguji Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hasil menunjukkan bahwa Secara simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi mempunyai pengaruh positif signifikan. Secara parsial memiliki pengaruh negatif yaitu variabel  $X_1$  (Kejelasan sasaran anggaran) dan  $X_2$  (Pengendalian akuntansi), dan pengaruh positif yaitu variabel (Sistem pelaporan)  $X_3$ . Dari penjelasan diatas maka didapatkan hipotesa berikut :

H3 : Laporan Keuangan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja

## 4. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran evaluasi dan capaian kinerja tertuang dalam LAKIP, pengukuran evaluasi kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing-masing kegiatan meliputi input, output, outcome, benefit dan impact yang dilaksanakan melalui proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan.

Penelitian terdahulu oleh Marolop, Andi (2014) menguji pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah kabupaten Toba Samosir. Hasil menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah sedangkan pertanggungjawaban anggaran tidak kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dari penjelasan diatas maka didapatkan hipotesa berikut :

H4 : Evaluasi empengaruhi Akuntabilitas Kinerja

### **5. Tunjangan terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Tunjangan diberikan dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemerintah memandang tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan perlu untuk ditingkatkan.

Berdasarkan uraian di atas disintesis bahwa tunjangan kinerja adalah tunjangan yang pemberiannya dikaitkan langsung dengan hasil kerja pegawai dengan dimensi tunjangan kinerja yaitu : Keadilan pembayaran (*Internal consistency*) dan Kelayakan pembayaran (*External consistency*), Ranupandojo dan Husnan (2007:33). Dari penjelasan diatas maka didapatkan hipotesa berikut :

H5 : Tunjangan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja

### **6. Sistem Informasi sebagai moderasi pengaruh Perencanaan terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Sistem informasi aplikasi RKAKL merupakan sebuah alat (tool) untuk mempermudah kerja dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKAKL). Hasilnya akan didapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akuntabel, efisien dan efektif.

Sebagai sebuah alat, maka aplikasi RKAKL serupa dengan produk teknologi lainnya, yaitu berguna untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kini sudah tidak

zamannya lagi membahas RKAKL menggunakan barang cetakan (hard copy) yang tentunya akan memakan waktu lama dan tidak efisien, tetapi kini sudah saatnya beralih pada soft copy aplikasi teknologi informasi (komputer) yang dengan mudah digunakan untuk menganalisa hasil pekerjaan, baik menyangkut kualitas maupun kuantitas pekerjaan, eksekusinya hanya tinggal hitungan detik saja.

Rekapitulasi yang dihasilkan dari simulasi aplikasi RKAKL akan membantu Perencana untuk menyusun skala prioritas kegiatan dan anggaran. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan hipotesa sebagai berikut :

H6 : Sistem Informasi dapat memoderasi hubungan antara Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

### **7. Sistem Informasi sebagai moderasi Pengaruh Pelaksanaan, terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah e-Tendering yaitu tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan menyampaikan 1 (satu) penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

e-Catalogue produk barang/jasa Pemerintah menampilkan informasi penyedia produk, spesifikasi produk, harga, serta gambar dari produk

barang/jasa Pemerintah. Produk yang sudah tampil di e-Catalogue produk barang/jasa Pemerintah dapat dibeli dengan menggunakan e-Purchasing.

e-Purchasing dibuat agar proses untuk pengadaan produk barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik, dengan adanya e-Purchasing produk barang/jasa Pemerintah diharapkan dapat lebih efisien dan lebih transparan. Dari penjelasan diatas maka didapatkan hipotesa berikut :

H7 : Sistem Informasi dapat memoderasi hubungan antara Pelaksanaan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

#### **8. Sistem Informasi sebagai moderasi Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melakukan pengembangan (upgrade) terhadap aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (cash toward accrual ) yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Mengingat bahwa aplikasi SAIBA merupakan sistem akuntansi berbasis sistem informasi, maka pengelolaan sistem informasi secara efektif dan efisien di dalam Kementerian Negara/Lembaga menjadi sebuah hal yang sangat penting.

Sistem informasi selanjutnya adalah E-Rekon dan LK adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

E-Rekon dan LK adalah suatu terobosan baru yang membuat proses penyusunan laporan keuangan oleh K/L menjadi lebih cepat, lebih mudah, simple dan akuntabel. Dari penjelasan diatas maka didapatkan hipotesa berikut :

H8 : Sistem Informasi dapat memoderasi hubungan antara Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja

#### **9. Sistem Informasi sebagai moderasi Pengaruh Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Sistem Informasi Data Keuangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai peranan penting dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem informasi ini dibangun berbasis web yang berfungsi untuk mempermudah mengelolah dan melaporkan informasi data keuangan dalam instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) wajib disusun oleh Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk mempertanggungjawabkan penyelenggara pemerintah dan pelaksanaan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel. Dari penjelasan diatas maka didapatkan hipotesa berikut :

H9 : Sistem Informasi dapat memoderasi hubungan antara Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja

#### **10. Sistem Informasi sebagai moderasi Pengaruh Tunjangan terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Tunjangan Kinerja adalah : (1) Terwujudnya proses transparansi hasil tunjangan kinerja yang tidak terbantahkan, dimana data-data maupun informasi tersebut secara tersistemasi (satu aplikasi dengan aplikasi lainnya). (2) Menghubungkan data dan informasi dengan Sistem Mesin Absensi. (3) Peningkatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi terkait dengan menerapkan prinsip adil, objektif, transparan, dan konsisten.

Pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai didasarkan kepada jabatan dan kelas jabatan, ada tiga unsur penilaian agar pegawai dapat menerima tunjangan kinerja yaitu berdasarkan absensi elektronik atau kehadiran, kinerja atau capaian kerja, dan disiplin pegawai. Dari penjelasan diatas maka didapatkan hipotesa berikut :

H10 : Sistem Informasi dapat memoderasi hubungan antara Tunjangan terhadap Akuntabilitas Kinerja

## METODE PENELITIAN

### Rancangan Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah pegawai Sekretariat BPSDM Perhubungan dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diasumsikan sebanyak 100 responden.

### Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang diteliti dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

#### a. *Independent Variable* / Variabel Bebas (X)

Variabel Bebas dalam penelitian ini, yaitu:

##### 1. Perencanaan / X1

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Perencanaan anggaran merupakan faktor penting yang harus dibahas secara matang dan penerapannya harus optimal. Proses dari penyusunan anggaran yang terjadi sebelum tahun atau periode berjalan.

Anggaran pada dasarnya merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu

##### 2. Pelaksanaan / X2

Pada pemerintah pusat, pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya DIPA. Segera di awal tahun anggaran dimulai (1 Januari), maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan kepada seluruh satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementerian/lembaga.

Pelaksanaan anggaran diuraikan kegiatan yang akan dijalankan, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran

tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. Pada dokumen pelaksanaan anggaran juga dilampirkan rencana kerja dan anggaran badan layanan umum dalam lingkungan kementerian negara/lembaga.

##### 3. Laporan Keuangan / X3

Proses pertanggungjawaban anggaran diawali dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif tersebut yaitu: (1) relevan, informasi harus memiliki feedback value, predictive value, tepat waktu dan lengkap; (2) andal, informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, variability, netralitas; (3) dapat dibandingkan, laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain dan (4) dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR/DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Selain laporan keuangan tersebut, juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan satuan kerja lainnya yang pengelolaannya diatur secara khusus, seperti Badan Layanan Umum (BLU)

##### 4. Evaluasi / X4

Evaluasi kinerja menekankan pada penilaian terhadap dampak suatu kebijakan, program, kegiatan, dan tata cara untuk melakukan penilaian terhadap tujuan dan sasaran kebijakan dan program.

Evaluasi kinerja dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara untuk mencapai

tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh. Evaluasi kinerja terhadap suatu kebijakan atau program seringkali sangat krusial dan menentukan pelaksanaan kebijakan atau program lainnya.

### 5. Tunjangan / X5

Tunjangan diberikan dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemerintah memandang tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan perlu untuk ditingkatkan.

Berdasarkan uraian di atas disintesis bahwa tunjangan kinerja adalah tunjangan yang pemberiannya dikaitkan langsung dengan hasil kerja pegawai dengan dimensi tunjangan kinerja yaitu : Keadilan pembayaran (*Internal consistency*) dan Kelayakan pembayaran (*External consistency*), Ranupandojo dan Husnan (2007:33).

### b. *Dependent Variable* / Variabel Terikat (Y)

Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

### c. *Moderation Variabel* / Variabel Moderasi (Z)

Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi.

Sistem informasi merupakan komoditas vital bagi sebuah organisasi atau perusahaan, yang terdiri dari data yang telah ditransformasikan dan dibuat lebih bernilai melalui pemrosesan.

Seluruh Kementerian Lembaga (K/L) dalam bidang pengelolaan

keuangan pusat, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan menggunakan sistem informasi yang sama dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan sistem informasi dilaksanakan dalam rangka membantu memudahkan Pemerintah Pusat dalam Penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan akuntansi dan pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

## METODE ANALISIS DATA

### Deskripsi Variabel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pengukuran *Skala Likert*. Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi dimensi-dimensi yang dapat diukur. Kemudian dimensi tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun butir-butir instrumen yang berupa pertanyaan yang dijawab oleh responden (Riduwan,2010:86).

Untuk mengukur dimensi dengan menggunakan Skala Likert yang disusun dalam bentuk pertanyaan dengan pilihan jawaban yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Setiap jawaban akan diberi nilai bobot berdasarkan rating skor 1 sampai dengan 5. Masing-masing diberi skor sebagai berikut Sangat Setuju = 5, Setuju = 4, Netral = 3, Tidak Setuju = 2 dan Sangat Tidak Setuju = 1.

### Perhitungan Validitas

Pengujian dengan SPSS yang pertama dilakukan adalah uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dilakukan dengan teknik analisis faktor yaitu menguji apakah butir-butir pertanyaan yang digunakan

dapat mengkonfirmasi sebuah faktor atau variabel konstruk.

Uji validitas ini menunjukkan suatu tingkat kemampuan dari alat pengukuran agar dapat mengungkapkan yang menjadi sasaran pokok pengukuran dan semakin tinggi nilainya semakin baik. Pengujian validitas ditujukan kepada sampel yang berada dalam populasi tersebut, yaitu dengan menghitung nilai korelasi antara skor setiap item dengan total item. Teknik korelasi yang digunakan adalah skor korelasi Rank Spearman, yaitu :

### Perhitungan Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula, kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi dengan menggunakan uji reliabilitas dan validitas. Peneliti melakukan uji reliabilitas dengan menghitung koefisien *Cronbach Alpha* dari masing-masing item dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal (reliable) apabila memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 (Duwi Priyatno, 2012:26).

### Statistik Deskriptif

Metode ini merupakan gambaran mengenai variabel penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan keuangan, evaluasi, tunjangan, akuntabilitas kinerja dan sistem informasi, sehingga dapat menjadi patokan analisis lebih lanjut mengenai nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, *varians*, dan standar deviasi.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan untuk melihat apakah data normal atau tidak. Jika data normal, maka analisa data dan pengujian hipotesis digunakan statistik

parametrik. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika probabilitas kurang dari 0,05 variabel tidak berdistribusi normal dan jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka variabel berdistribusi normal (Santoso, 2014).

#### 2. Uji Multikolinieritas

Digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dengan besaran koefisien korelasi ( $r$ ). Multikolinieritas terjadi jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih dari 0,60. Multikolinieritas tidak terjadi jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ( $r \leq 0,60$ ). Jika terjadi gejala multikolinieritas yang tinggi, standard error koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar. Dengan demikian, terbuka kemungkinan terjadinya kekeliruan yaitu menerima hipotesis yang salah. Uji multikolinieritas dapat dilaksanakan dengan cara meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independen variabel dengan menggunakan *variance inflating factor (VIF)*. Batas VIF adalah 10 apabila nilai VIF lebih besar daripada 10 maka terjadi multikolinieritas.

#### 3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam satu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini ( $t$ ) dengan kesalahan pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji *Dubin-Watson (DW test)*.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik

adalah model yang homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat diuji dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.

**Analisis Regresi**

**1. Regresi Sederhana**

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kelinieran hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent, dengan rumus

$$\hat{Y} = a + b X$$

**2. Regresi Ganda**

Analisis regresi digunakan untuk menaksir nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X serta taksiran perubahan variabel Y untuk setiap satuan perubahan variabel X. Bentuk persamaan regresi multiple dengan dua variabel bebas adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6*Z + b_7X_7*Z + b_8X_8*Z + b_9X_9*Z + b_{10}X_{10}*Z$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Uji Validitas**

**Tabel 1 Uji Validitas**

No	Variabel X1	Variabel X2	Variabel X3	Variabel X4	Variabel X5	Variabel Y	Variabel Z
1	.807	.589	.921	.876	.663	.759	.943
2	.807	.786	.765	.690	.662	.897	.976
3	.903	.870	.890	.368	.745	.875	.976
4	.903	.796		.855	.827	.875	.967
5	.857				.706	.612	.689
6	.734				.462	.427	
7	.719					.762	
8	.483					.494	

Sumber : Data diolah SPSS 24 (2019)

Berdasarkan tabel 1 pengujian validitas maka untuk kelima belas butir pernyataan tersebut sudah valid

**2. Uji Reliabilitas**

Metode pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Cronbach's Alpha*. *Alpha Cronbach* merupakan salah satu koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan. Nilai *Cronbach's Alpha* dapat dikatakan reliabel apabila besarnya lebih dari 0,60 atau 60%. Uji reliabilitas dengan

menggunakan *Cronbach's Alpha* berikut disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2 Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Nilai Standar	Kesimpulan
Perencanaan_X1	.935	8	0,60	Reliabel
Pelaksanaan_X2	.888	4	0,60	Reliabel
Laporan Keuangan_X3	.929	3	0,60	Reliabel
Evaluasi_X4	.849	4	0,60	Reliabel
Tunjangan_X5	.872	6	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja_Y	.912	8	0,60	Reliabel
Sistem Informasi_Z	.968	5	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa nilai *cronbach alpha* dari hasil perhitungan seluruh variabel berkisar antara 0 sampai 1 (0,872 -0,968) atau dengan kata lain nilai alpha > 0,6 (nilai standar). Dari data tersebut terlihat bahwa seluruh nilai *cronbach alpha* sangat tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan sudah sangat reliabel, sehingga instrumen dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Oleh karena kuesioner telah dinyatakan *valid* dan *reliabel*, maka kuesioner tersebut sudah layak untuk disebarkan kepada responden dan dapat digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini.

**3. Deskriptif Statistik**

Hasil deskriptif statistik dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 3 Deskriptif Statistik**

	N		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
	Valid	Missing				
Perencanaan_X1	100	0	23,6481	4,63282	11,35	34,27
Pelaksanaan_X2	100	0	13,1868	2,66453	6,43	17,79
Laporan_Keuangan_X3	100	0	9,1715	2,29656	4,44	12,96
Evaluasi_X4	100	0	12,8651	2,62756	7,50	17,52
Tunjangan_X5	100	0	17,9627	3,86859	8,60	26,08
Akuntabilitas_Kinerja_Y	100	0	24,3914	4,92558	12,61	34,51
Sistem_Informasi_Z	100	0	15,7747	3,18479	8,72	21,66

Semua variabel menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (mean). Hal ini menunjukkan bahwa

sebaran data semua variabel adalah merata, artinya perbedaan data satu dengan yang lainnya tidak terlalu tinggi.

**Pengujian Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**

Pengujian yang digunakan untuk menguji normalitas data yaitu dengan menggunakan analisa grafik P-P plot dan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*.

**Tabel 4 One Sample KolmogorovSmirnov**

		.X1	.X2	.X3	.X4	.X5	.Y	.Z	.X1*Z	.X2*Z	.X3*Z	.X4*Z	.X5*Z
N		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Normal	Mean	23,6481	3,1868	9,1715	12,8651	17,9627	24,3914	15,7747	382,0279	113,0258	148,1612	207,8283	350,1730
Para	Std. Deviation	4,63282	2,66453	2,29656	2,80156	3,86859	4,92558	3,18479	74,83989	3,05324	37,09840	42,44042	52,49177
Most	Absolute	,058	,086	,104	,085	,069	,114	,062	,058	,086	,105	,085	,069
Extreme	Positive	,058	,043	,065	,085	,069	,073	,042	,058	,044	,066	,085	,069
Differences	Negative	-,055	-,086	-,104	-,082	-,050	-,114	-,062	-,055	-,086	-,105	-,082	-,050
Kolmogorov-Smirnov	Z	,581	,857	1,045	,847	,690	1,140	,618	,582	,859	1,051	,845	,687
Asymp. Sig. (2-tailed)		,888	,455	,225	,470	,727	,149	,839	,887	,452	,219	,473	,732

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data olahan SPSS 24 (2019)

Berdasarkan hasil *output* pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig 2 tailed*) pada semua variabel > 0,05. Maka nilai statistik Uji Kolmogorov Smirnov menunjukan nilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa variabel dependen berdistribusi normal.

**2. Uji Multikolinearitas**

Gejala multikolinearitas ditandai dengan adanya hubungan yang kuat diantara variabel independen (bebas) dalam suatu persamaan regresi. Apabila dalam suatu persamaan regresi terdapat gejala multikolinieritas, maka akan menyebabkan ketidakpastian estimasi, sehingga kesimpulan yang diambil tidak tepat. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* > 0.10 dan nilai *VIF* < 10. Hasil pengujian asumsi multikolinearitas untuk variabel penelitian ini dapat dilihat berdasarkan nilai *VIF* dan nilai *Tolerance* sebagai berikut :

**Tabel 5 Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Perencanaan_X1	,472	2,120
Pelaksanaan_X2	,538	1,860
Laporan_Keuangan_X3	,312	3,210
Evaluasi_X4	,455	2,197
Tunjangan_X5	,544	1,838

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki hasil *Variance Inflation Factor (VIF)* yang mencerminkan tidak ada satu pun variabel independen yang memiliki nilai *VIF* lebih dari 10. Hasil perhitungan nilai *Tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Jadi dapat dinyatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

**3. Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson yaitu  $du < dw < du$  maka tidak terjadi autokorelasi.

Hasil pengujian autokorelasi ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

**Tabel 6 Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,881 <sup>a</sup>	,775	,764	2,39513	1,997

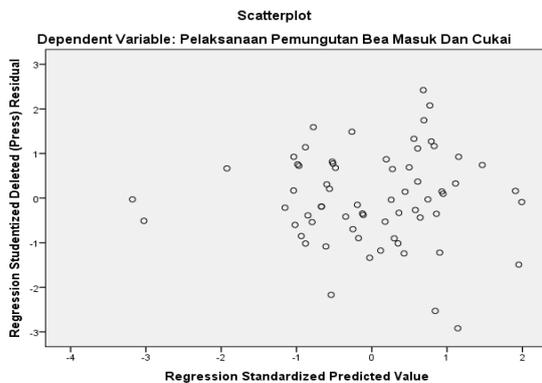
Dari nilai output terlihat bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,997. Dengan demikian tidak terjadi autokorelasi di dalam model regresi.

**4. Uji Heteroskedastisitas**

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada

grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized* seperti yang tampak pada gambar di bawah ini :

**Gambar Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Data olahan SPSS 24 (2019)

Berdasarkan gambar tersebut hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa pencaran data tidak membentuk pola tertentu atau tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

**Uji Hipotesis**

**1. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)**

**Tabel 7 Hasil Uji R<sup>2</sup>**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.881 <sup>a</sup>	.775	.764	2.39513

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X2, X4, X3  
 Sumber : Data olahan SPSS 24 (2019)

Berdasarkan tabel 8 Hasil Koefisien Korelasi Dan Determinasi Berganda diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,881 maka hubungan pengaruh perencanaan, pelaksanaan, laporan keuangan, evaluasi, tunjangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat BPSDM Perhubungan adalah sangat kuat dan searah (positif). Mencari besarnya kontribusi pengaruh dari variabel pengaruh perencanaan, pelaksanaan, laporan keuangan, evaluasi, tunjangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat

BPSDM Perhubungan, maka digunakan analisis koefisien determinasi atau yang disebut *R square*. Dari analisis komputer diperoleh R<sup>2</sup> sebesar 0,775 (77,5%) berarti bahwa pengaruh variabel bebas yaitu implementasi nilai-nilai Sekretariat BPSDM Perhubungan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan sebesar 77,5% sedangkan sebesar 22,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak di analisis dalam penelitian ini.

**2. Uji F (Pengujian Simultan)**

Pengujian secara simultan untuk mengetahui pengaruh dari seluruh variabel bebas (Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Keuangan, Evaluasi, Tunjangan) terhadap variabel dependennya (Akuntabilitas Kinerja). Dalam penelitian ini pengujian simultan yang dilakukan menggunakan Uji F ditunjukkan dengan tabel berikut :

**Tabel 8 Hasil Pengujian Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1862,709	5	372,542	64,950	,000 <sup>b</sup>
	Residual	539,166	94	5,736		
	Total	2401,875	99			

Berdasarkan hasil uji F di dapat hasil F hitung 64.938 dengan probabilitas sebesar 0.000. Probabilitas yang jauh lebih kecil dari 0.05, berarti model regresi diperbolehkan untuk memprediksi Akuntabilitas Kinerja atau dapat dikatakan bahwa Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Keuangan, Evaluasi, Tunjangan dan interaksi dengan Sistem Informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja yang artinya H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> gagal ditolak.

**3. Uji t (Pengujian Parsial)**

Berikut meruapakan perhitungan uji t yang telah dilakukan :

**Tabel 9 Hasil Pengujian Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.935	1,648		-.567	.572
X1	.186	.076	.175	2,455	.016
X2	.277	.123	.150	2,247	.027
X3	.526	.188	.245	2,801	.006
X4	.579	.136	.309	4,264	.000
X5	.279	.084	.219	3,306	.001
X1*Z	.011	.005	.175	2,455	.016
X2*Z	.017	.008	.150	2,246	.027
X3*Z	.033	.012	.245	2,801	.006
X4*Z	.036	.008	.309	4,263	.000
X5*Z	.017	.005	.219	3,306	.001

a. Dependent Variable: Y  
 Sumber : Data olahan SPSS 24 (2019)

Dengan penjelasan sebagai berikut :

**1) H1 : Perencanaan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja**

Dengan  $\alpha = 5\%$  nilai signifikansi  $0,016 < 0,05$  maka H1 diterima yang artinya terdapat pengaruh perencanaan terhadap akuntabilitas kinerja.

**2) H2 : Pelaksanaan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja**

Dengan  $\alpha = 5\%$  nilai signifikansi  $0,027 < 0,05$  maka H2 diterima yang artinya terdapat pengaruh pelaksanaan terhadap akuntabilitas kinerja.

**3) H3 : Laporan Keuangan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja**

Dengan  $\alpha = 5\%$  nilai signifikansi  $0,006 < 0,05$  maka H3 diterima yang artinya terdapat pengaruh laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja.

**4) H4 : Evaluasi mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja**

Dengan  $\alpha = 5\%$  nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka H4 diterima yang artinya terdapat pengaruh evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja.

**5) H5 : Tunjangan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja**

Dengan  $\alpha = 5\%$  nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  maka H5 diterima yang artinya terdapat pengaruh tunjangan terhadap akuntabilitas kinerja

**6) H6 : Pengaruh Perencanaan terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dimoderasi Sistem Informasi**

Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansi  $0.016 < 0.05$  maka H6 diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh perencanaan terhadap akuntabilitas kinerja yang di moderasi sistem informasi.

**7) H7 : Pengaruh Pelaksanaan terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dimoderasi Sistem Informasi**

Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansi  $0.027 < 0.05$  maka H7 diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh pelaksanaan terhadap akuntabilitas kinerja yang di moderasi sistem informasi

**8) H8 : Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dimoderasi Sistem Informasi**

Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansi  $0.006 < 0.05$  maka H8 diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja yang di moderasi sistem informasi

**9) H9 : Pengaruh Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dimoderasi Sistem Informasi**

Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$  maka H9 diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja yang di moderasi sistem informasi

**10) H10 : Pengaruh Tunjangan terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dimoderasi Sistem Informasi**

Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansi  $0.001 < 0.05$  maka H10 diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh tunjangan terhadap akuntabilitas kinerja yang di moderasi sistem informasi

**Pembahasan Hasil Penelitian**

**1. Pengaruh Perencanaan terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika perencanaan yang dilakukan semakin baik, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, oleh karena itu perencanaan merupakan pondasi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi atau instansi.

**2. Pengaruh Pelaksanaan terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan berpengaruh positif

dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika pelaksanaan yang dilakukan semakin baik, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pelaksanaan yang berpedoman pada peraturan yang berlaku agar kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai koridor hukum.

### **3. Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Herawati, Netty (2011) sistem pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini dikarenakan proses pertanggungjawaban anggaran diawali dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah dan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

### **4. Pengaruh Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel evaluasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika evaluasi yang dilakukan semakin baik, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah agar organisasi mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab tidak tercapainya kinerja dalam pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

### **5. Pengaruh Tunjangan terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tunjangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika tunjangan meningkat, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa tunjangan (*benefit*) merupakan kompensasi tidak langsung yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai itu sendiri. Kompensasi ini biasanya diperlukan sebagai upaya menciptakan kondisi yang lebih baik dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu pemberian tunjangan kinerja yang sesuai dengan beban kerjanya.

### **6. Pengaruh Perencanaan terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan dimoderasi oleh Sistem Informasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem informasi dapat memperkuat hubungan antara perencanaan dengan akuntabilitas kinerja. Hal ini menyatakan bahwa sistem informasi memberikan reaksi perubahan terhadap perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

Sistem informasi dapat berupa aplikasi maupun data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan perencanaan anggaran saat ini dan akan datang.

### **7. Pengaruh Pelaksanaan terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan dimoderasi oleh Sistem Informasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem informasi dapat memperkuat hubungan antara pelaksanaan dengan akuntabilitas kinerja. Hal ini menyatakan bahwa sistem informasi memberikan reaksi perubahan terhadap pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja.

Saat ini satker menggunakan sistem informasi dalam bentuk aplikasi untuk pelaksanaan anggaran. Saat ini teknologi dan sistem informasi yang sudah berjalan dan sedang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk seluruh Kementerian Lembaga adalah Sistem Akuntansi Intansi (SA) dan e-rekon.

## **8. Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan dimoderasi oleh Sistem Informasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem informasi dapat memperkuat hubungan antara laporan keuangan dengan akuntabilitas kinerja. Hal ini menyatakan bahwa sistem informasi memberikan reaksi perubahan terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja.

Dengan dibangunnya sistem informasi berupa aplikasi untuk pelaporan keuangan, maka penggunaan aplikasi tersebut membantu memudahkan Pemerintah Pusat dalam penyusunan dan penatausahaan akuntansi dan pelaporan maupun pertanggungjawaban APBN, hal ini akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang semakin baik.

## **9. Pengaruh Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan dimoderasi oleh Sistem Informasi**

Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan evaluasi dengan akuntabilitas kinerja. Hal ini menyatakan bahwa sistem informasi memberikan reaksi perubahan terhadap evaluasi dan akuntabilitas kinerja.

Untuk mengetahui kemajuan dan kendala suatu organisasi serta penyebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan maka harus dilakukan evaluasi setiap bulan. Evaluasi diperuntukan untuk seluruh pegawai dengan menggunakan sistem informasi berupa LAKIP, sehingga dengan adanya sistem informasi tersebut akan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## **10. Pengaruh Tunjangan terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan dimoderasi oleh Sistem Informasi**

Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan tunjangan dengan akuntabilitas kinerja. Hal ini menyatakan bahwa sistem informasi memberikan reaksi perubahan terhadap tunjangan dan akuntabilitas kinerja.

Sistem Informasi Tunjangan Kinerja merupakan alat yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai tersebut. Sistem informasi tersebut dapat membantu instansi dalam menentukan pegawai yang mempunyai tugas / pekerjaan / jabatan tertentu di lingkungannya untuk mendapat tunjangan.

## **SIMPULAN**

1. Perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
2. Pelaksanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
3. Laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
4. Evaluasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
5. Tunjangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
6. Sistem informasi dapat memperkuat hubungan antara perencanaan dengan akuntabilitas kinerja.
7. Sistem informasi dapat memperkuat hubungan antara pelaksanaan dengan akuntabilitas kinerja.
8. Sistem informasi dapat memperkuat hubungan antara laporan keuangan dengan akuntabilitas kinerja.
9. Sistem informasi dapat memperkuat hubungan antara evaluasi dengan akuntabilitas kinerja.
10. Sistem informasi dapat memperkuat hubungan antara tunjangan dengan akuntabilitas kinerja.

## **KETERBATASAN**

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya :

1. Penelitian ini hanya menggunakan 5 (lima) variabel independen yaitu

- Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Keuangan, Evaluasi, Tunjangan. Berdasarkan uji  $R^2$  (koefisien determinasi) pengaruh variabel bebas terhadap Akuntabilitas Kinerja hanya sebesar 77.5% sedangkan sisanya sebesar 22.5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak di analisis dalam penelitian ini.
2. Sampel penelitian ini hanya 1 (satu) satuan kerja di tingkat Eselon I yaitu BPSDM Perhubungan dan bukan secara keseluruhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) satuan kerja.
  3. Penambahan variabel evaluasi dan tunjangan sebagai variabel independen dan sistem informasi sebagai variabel moderasi merupakan kontribusi baru dalam penelitian ini sehingga minimnya penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai pembanding dan pendukung hasil yang diperoleh.

## IMPLIKASI

### 1. Bagi Sekretariat BPSDM Perhubungan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Keuangan, Evaluasi, Tunjangan terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Sistem Informasi sebagai Variabel Moderasi. Sehingga keefektifan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di Sekretariat BPSDM Perhubungan dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Cara yang dapat ditempuh adalah tetap mengusahakan pencapaian kegiatan sebesar 100%, menyusun dan melaksanakan kegiatan yang mengacu pada visi dan misi organisasi, mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan lebih melibatkan para pemangku kepentingan serta berupaya memberikan pelayanan publik dengan lebih baik.

### 2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini merupakan bukti empiris bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan

Keuangan, Evaluasi, Tunjangan dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja yang dimoderasi oleh Sistem Informasi.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel yang diduga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti komitmen manajemen, budaya organisasi, pelatihan pegawai, pengambilan keputusan otoritas, dan variabel-variabel lainnya.
- b. Melakukan penelitian pada instansi lain sehingga hasil penelitian dapat dijadikan perbandingan.
- c. Penelitian lain menggunakan pendekatan sekunder serta memperpanjang tahun penelitian sehingga hasil penelitian lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Safaruddin, Sutriana Basri. 2016. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari)*.
- Bastian, Indra. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 3. Jakarta : Erlangga.
- Wibisono, Seto. 2016. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- DEPUTI IV BPKP. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta : BPKP.
- Aprila dan Melfariza. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu*.
- Cefrida S, Mentari. 2017. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap*

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Mulyono, Imam. 2009. Uji Empiris Model Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah .
- Herawati, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, (Online), Volume 13 No. 2, (diakses 27 September 2012).
- Husein, Umar. 2010. Metode Riset Perilaku Organisasi. Jakarta : Gramedia.
- Ghozali, Imam. 2018. IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang. Badan Penerbit UNDIP.
- Jonathan Sarwono, 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Cetakan Pertama, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Herika Debora, Brahmana. 2018. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Sistem Informasi sebagai Variabel Moderating pada RS Vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Priyatno, Duwi. 2012 *Mandiri Belajar SPSS*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta : Media Kom.
- Purbayu Budi Santosa dan Ashari. 2010. Analisis Statistik dengan Microsoft Excell dan SPSS, Andi : Yogyakarta.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP. 2007. Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Revisi). Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Riduwan. 2010. Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Bandung : CV. Alfabeta.
- Santoso. 2013. Analisis Laporan.
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Statistika Untuk Penelitian. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Haslinda. 2016. Pengaruh perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi dengan standar biaya sebagai variabel moderating (studi kasus pemerintah daerah kabupaten wajo).
- Direktur jenderal perbendaharaan. 2008. Peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor : per-51/pb/2008 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
- Marolop, Andi. 2014. pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Toba Samosir.
- Ghozali Syahdam. 2012. SPSS 13.0 terapan : Riset Statistik dan Parametrik. Yogyakarta : CV. Andi Offset.